

Dapat disimpulkan bahwa *murābahah* berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* adalah pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada nasabah dengan cara bank membelikan barang sesuai dengan klasifikasi yang telah dijelaskan oleh nasabah kepada pihak bank, kemudian pihak bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan ketentuan pihak bank harus memberitahukan harga asli dari barang tersebut kemudian ditambahkan dengan keuntungan yang akan diambil oleh pihak bank.

Melihat pengertian yang dijelaskan di dalam Fatwa dewan Syariah Nasional tersebut, Hasbi Ash Shiddiqiey menganggap *murābahah* adalah menjual barang dengan mengambil keuntungan (laba) tertentu.³ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mengartikan *murābahah* sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui.⁴

Lain halnya dengan Ascara yang mengartikan bahwa *murābahah* merupakan penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimaksudkan kedalam harga jual barang tersebut, dan kemudian pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh.⁵ Untuk pembiayaan *murābahah* sendiri merupakan pembiayaan dalam bentuk jual beli yang saling menguntungkan oleh *ṣāhib al māl* dengan pihak yang membutuhkan melalui

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash shiddieqy, *Hukum- Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab* (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997), 353.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: Pustaka, 1988), 83.

⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 163-164.

ketiga atas barang pesanan tersebut yang telah dipesan. Apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada si pembeli. Jika kemudian si pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Seandainya penjualan aset tersebut merugi, misalkan saja kalau nasabah adalah pedagang juga, maka pemesan tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Hal tersebut terjadi karena transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang dilakukan nasabah merupakan akad yang benar-benar terpisah dari akad *murābahah* pertama dengan bank.

Kemudian ada juga penundaan pembayaran oleh debitor mampu. Yang maksudnya adalah seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam akad *murābahah* ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, maka pihak pembeli dapat mengambil tindakan yaitu mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali uang tersebut dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

Dan ketentuan yang terakhir adalah bangkrut. Yang dimaksud dengan bangkrut adalah jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai, sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup mengembalikan.

- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka;
 - 1. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - 2. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- h. Jaminan dalam *murābahah*:
 - 1. Jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
 - 2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- i. Hutang dalam *murābahah*:
 - 1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murābahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
 - 2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
 - 3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
- j. Penundaan pembayaran dalam *murābahah*:
 - 1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
 - 2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

